



LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

KECAMATAN PASIMASUNGGU

2025

KANTOR KECAMATAN PASIMASUNGGU
JL. PELABUHAN NO.123 BENTENG JAMPEA
Pos-el : kecamatanpasimasunggu@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

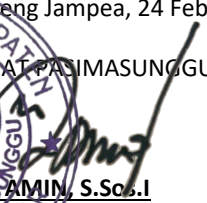
Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Disamping itu laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Pasimasunggu tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2025, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kepulauan Selayar, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah SWT.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.

Benteng Jamea, 24 Februari 2026
CAMAT PASIMASUNGGU,

NUB AMIN, S.Sc.I
Pangkat : Penata Tk. I
Np. 198409032011011014



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pasimasunggu.....	1
1.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	9
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	9
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	16
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	17
2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	18
2.1.5 Inovasi.....	18
2.1.6 Prestasi/Penghargaan.....	19
2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.....	19
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 19	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
3.1 Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan	20
3.2 Hambatan – Hambatan.....	20
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pasimasunggu

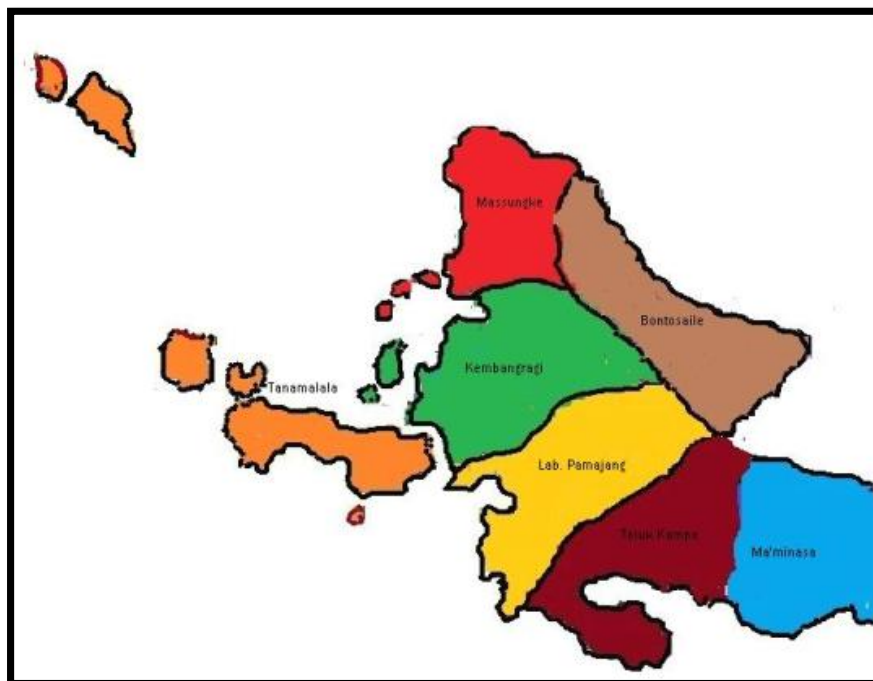
Kecamatan Pasimasunggu adalah salah satu kecamatan yang berada dikepulauan dengan luas wilayah + 114,50 km², Yang berbatasan dengan

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Taka Bonerate
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasimasunggu Timur
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasimarannu

luas Kecamatan Pasimasunggu tercatat 131,80 Km², secara administratif terbagi menjadi 7 (tujuh) Desa, dengan jumlah penduduk Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2023 adalah sebesar 9.261 jiwa, adapun mata pencaharian penduduk sangat bervariasi mulai dari nelayan, petani, peternak, pedagang, dan sebagian lain Pegawai Negeri Sipil dan swasta.

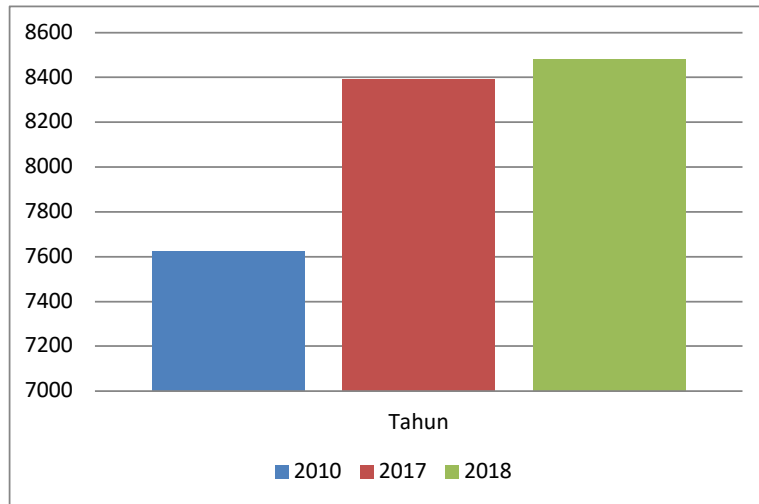
Gambar 1.1.1

Wilayah Administratif Kecamatan Pasimasunggu



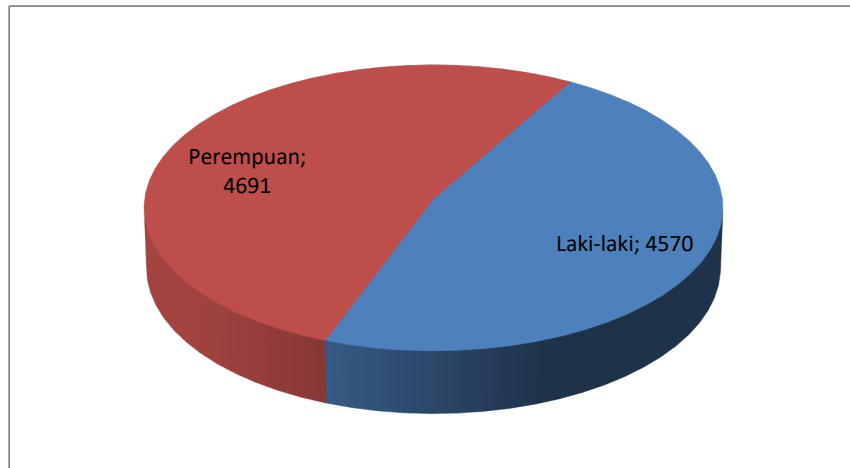
Gambar 1.1.2

Perkembangan Penduduk Kecamatan Pasimasunggu



Gambar 1.1.3

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pasimasunggu secara administratif, dibagi dalam 7 (tujuh) desa, masing :

1. **Desa Kembangragi**, merupakan desa yang berada di ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 2.777 jiwa yang terdiri dari 1.361 laki-laki dan 1.416 perempuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kembangragi, dibagi dalam 6 (enam) dusun, yaitu :
 - Dusun Benteng Barat
 - Dusun Benteng Timur
 - Dusun Benteng Selatan
 - Dusun Karama
 - Dusun Lajongko
 - Dusun Bonelambere
2. **Desa Massungke** yang terletak di sebelah utara ibukota kecamatan pasimasunggu dengan jumlah penduduk sebesar 1.103 jiwa yang terdiri dari 536 laki-laki dan 567 perempuan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa massungke terbagi menjadi 4 (empat) dusun. Yaitu :
 - Dusun Dodak
 - Dusun Bonesiallak
 - Dusun Massungke
 - Dusun Kayuangin
3. **Desa Bontosaile**, yang terletak di sebelah timur ibukota kecamatan pasimasunggu dengan jumlah penduduk sebesar 984 jiwa, yang terdiri dari 475 laki-laki 509 perempuan, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bontosaile terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu :
 - Dusun Bonelamber I
 - Dusun Binanganipa
 - Dusun Binangabakka
 - Dusun Tangga Bangko
4. **Desa Labuang Pamajang** terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Pasimasunggu, dengan jumlah penduduk sebesar 1.424 jiwa yang terdiri dari 703 laki-laki dan 721 perempuan, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Labuang Pamajang terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu :
 - Dusun Mangatti
 - Dusun Mangatti Utara
 - Dusun Mangatti Selatan
 - Dusun Batu So'bolo
5. **Desa Ma'minasa** terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Pasimasunggu, dengan jumlah penduduk sebesar 1.083 jiwa yang terdiri dari 539 laki-laki dan 544 perempuan, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ma'minasa terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu :

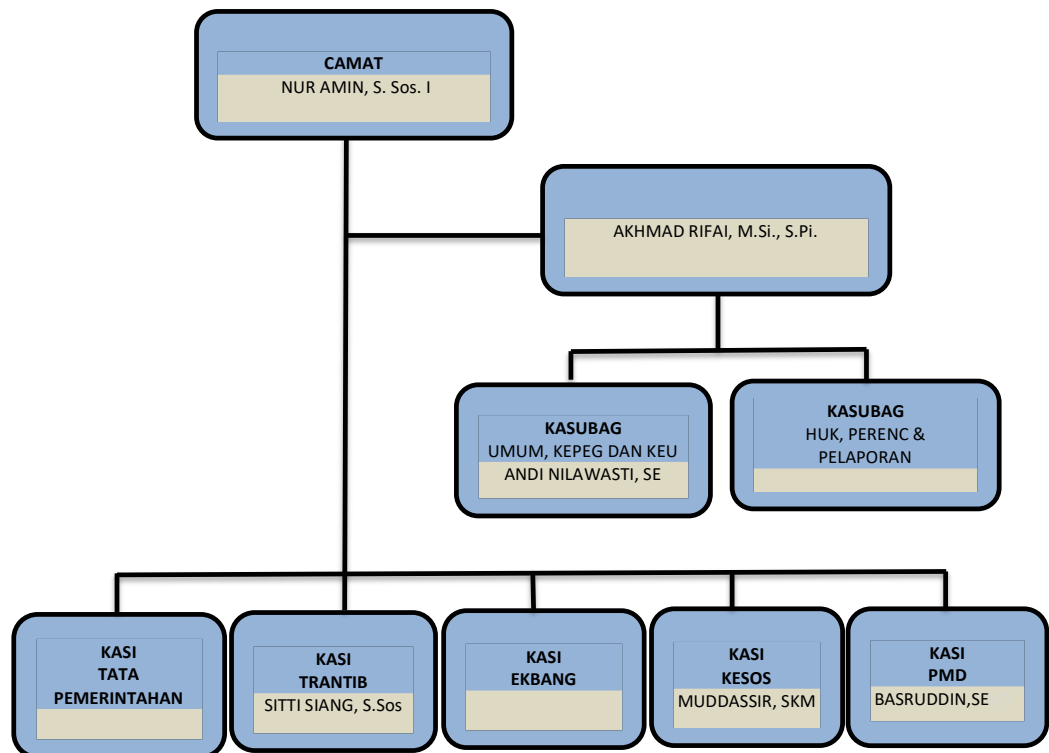
- Dusun Marege
 - Dusun Marege Utara
 - Dusun Marege Selatan
 - Dusun Labuang Pakangkang
6. **Desa Tanamalala** terletak di sebelah Barat ibukota Kecamatan Pasimasunggu, dengan jumlah penduduk sebesar 836 jiwa yang terdiri dari 432 laki-laki dan 404 perempuan, dalam penyekenggaraan pemerintahan Desa Tanamalala terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu :
- Dusun Tanjung Bone
 - Dusun Tanjung Lasore
 - Dusun Tanjung Karang
 - Dusun Jailamu
7. **Desa Teluk Kampe** merupakan pemekaran dari Desa Ma'minasa, dengan jumlah penduduk sebesar 1.054 jiwa yang terdiri dari 524 laki-laki dan 530 perempuan, dalam penyekenggaraan pemerintahan Desa Teluk Kampe terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu :
- Dusun Eremata
 - Dusun Kampung Tangnga
 - Dusun Kampung Camba

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Pasimasunggu di pusatkan di Desa Kembangragi dengan alamat kantor Jalan Pelabuhan No.123 Benteng Jamea. Email: pasimasunggukecamatan@gmail.com. Kecamatan Pasimasunggu terletak pada koordinat 7°4'12.83"LS,120°38'37.02"BT

1.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Pasimasunggu



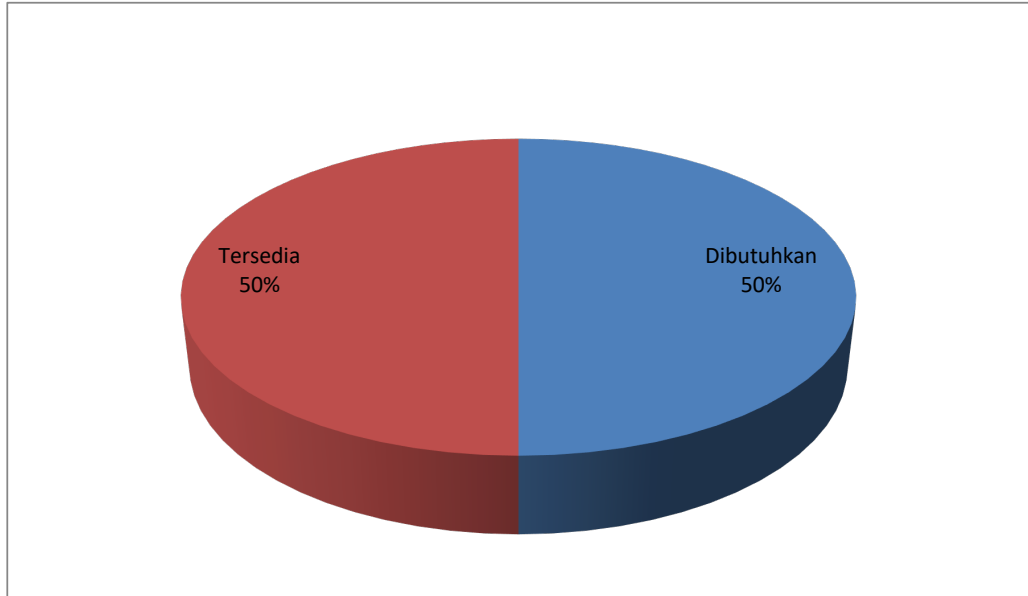
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar perhitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 22 Pegawai Organik dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 5 (lima) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketentraman dan ketertiban sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga diluar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 13 Pegawai Organik dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, Pangkat/Golongan ruang, Jabatan Struktural, Pendidikan Umum, dan Diklat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina, IV/b	-	-	-
2.	Pembina, IV/a	1	-	1
3.	Penata Tk. I, III/d	3	1	4
4.	Penata, III/c	-	-	-
5.	Penata Muda TK. I, III/b	-	1	1
6.	Penata Muda, III/a	-	3	3
7.	Pengatur Tk. I, II/d	2	1	3
8.	Pengatur, II/c	1	-	1
9.	Pengatur Muda TK. I, II/b	-	-	-
10.	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
11.	Juru Tk. I, I/d	-	-	-
No.	Pangkat/Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Total
12.	Juru , I/c	-	-	-
13.	Juru Muda TK. I, I/b	-	-	-
14.	Juru Muda, I/a	-	-	-
15.	Tenaga Kontrak/Honorar	5	4	9
Jumlah		12	10	22

Gambar 1.3.1
Persentase Kebutuhan Aparatur Kecamatan Pasimasunggu



Tabel 1.3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah
1	Eselon III-a	-
2	Eselon III-b	1
3	Eselon IV-a	3
4	Eselon IV-b	1
Jumlah		5

Tabel 1.3.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Latar Belakang Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata 2	2	-	2
2	Strata 1	2	3	5
3	Diploma 3	-	-	-
4	SLTA	3	3	6
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		6	6	13

Tabel 1.3.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan & Pelatihan (Diklat)

No.	Pendidikan & Pelatihan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Diklat PIM II	-	-	-
2	Diklat PIM III	-	-	-
3	Diklat PIM IV	2	1	3
4	Diklat Prajabatan	-	-	-
Jumlah		2	1	3

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan Kecamatan Pasimasunggu mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan masyarakat yang merupakan perpanjangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan selayar. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pasimasunggu pada tahun 2025 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada tahun ini Kecamatan Pasimasunggu melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran belanja operasi sebesar Rp. 1.911.907.500,00 yang merupakan akumulasi dari belanja pegawai sebesar Rp1.440.348.000,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp426.161.500,00 dan belanja hibah Rp45.398.000,00. Dari total anggaran operasi tersebut terealisasi sebesar 1.561.606.939,00 atau 81,68% dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.469.258.014,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp.374.989.650,00 dan belanja modal Rp. 27.340.000,00. Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan menitikberatkan pada kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rencana kerja strategis.

Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 5 Program dan 10 Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan agar terwujudnya Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp1.777.557.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.437.110.039,00 atau 80,85% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut.

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp.15.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.675.000,00 atau 100 %.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp.1.440.348.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.110.210.843,00 atau 94,10%.
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 176.758.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 175.660.050,00 atau 99,38%.
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.79.866.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.75.163.146,00 atau 94,11 %.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.35.458.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.340.000,00 atau 77,10%

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertujuan agar terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran Rp.48.005.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.47.813.000,00 atau 99,60% dari alokasi anggaran yang tersedia. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

- a) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan output kegiatan terselenggaranya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah

dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.45.398.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.45.398.000,00 atau 100%.

- b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan output kegiatan terselenggaranya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.2.607.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.415.000,00 atau 92,60%

3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan output terselenggaranya kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menggunakan anggaran sebesar Rp.9.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.375.000,00 atau 100%

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan output terselenggaranya kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.9.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.375.000,00 atau 100%

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan output terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.65.391.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.731.000,00 atau 85,23% dari alokasi anggaran yang tersedia, adapun rincian kegiatan dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

- a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan output terselenggaranya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alokasi anggaran Rp.58.093.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.433.100,00 atau 83,37%.

- b) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan output terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan alokasi anggaran Rp.7.297.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.297.900,00 atau 100%

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan output terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran Rp.11.577.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.577.900,00 atau 100% dari alokasi anggaran yang disediakan, adapun rincian kegiatan dari Program Pengembangan Nilai Budaya sebagai berikut :

- a) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran Rp.2.415.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.415.000,00 atau 100%.
- b) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan output kegiatan telaksananya kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.162.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.162.900,00 atau 100%

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Unsur kewilayahan	KECAMATAN PASIMASUNGGU	RKPD Tahun 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	94,45%	Beberapa kendala teknis pelaksanaan kegiatan baik dalam hal waktu pelaksanaan maupun kondisi lapangan	Koordinasi pelaksanaan teknis kegiatan	
					Alokasi Anggaran Rp1.892.101.000,00	Realisasi Anggaran Rp1.787.146.164,00			
			DPA KECAMATAN PASIMASUNGGU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
					100%	100%			
			1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					100%	100%			
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					100%	100%			
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					100%	100%			
			4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
					100%	94,10%			
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.561.400.000,00	Rp1.469.258.014,00			
					100%	94,10%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,64%			
					100%	99,77%			
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp169.313.450,00	Rp168.927.450,00			
					100%	99,77%			
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan						
		100%	100,00%						
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp27.608.450,00	Rp27.608.450,00						
		100%	100,00%						
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan						
		100%	89,67%						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp1.927.000,00	Rp1.927.000,00			
					12 Bulan	12 Bulan			
				3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	85,71%			
					Rp2.100.000,00	Rp1.800.000			
					12 Bulan	12 Bulan			
				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100,00%			
					Rp25.530.000,00	Rp25.530.000,00			
					12 Bulan	12 Bulan			
				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KONSULTASI SKPD	100%	99,92%			
					Rp112.148.000,00	Rp112.062.000,00			
					100%	77,10%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					Rp35.458.750,00	Rp27.340.000,00			
					1 Unit	1 Unit			
				1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
					Rp35.458.750,00	Rp27.340.000,00			
					100%	99,25%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					100,00%	99,25%			
					Rp81.676.000,00	Rp81.063.900,00			
					12 Bulan	12 Bulan			
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	94,43%			
					Rp10.980.000,00	Rp10.367.900,00			
					12 Bulan	12 Bulan			
				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100,00%			
					Rp70.696.000,00	Rp70.696.000,00			
					100%	89,22%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					100,00%	89,22%			
					Rp34.284.000,00	Rp30.588.000,00			
					100%	88,80%			
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	88,80%			
					Rp31.404.000,00	Rp27.888.000,00			
					1 Unit	1 Unit			
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	93,75%			
					Rp2.880.000,00	Rp2.700.000,00			
					100%	99,87%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN					
					100,00%	99,87%			
					Rp40.713.700,00	Rp40.662.500,00			
					100%	99,87%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp40.713.700,00	Rp40.662.500,00			
				1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Kegiatan 100% Rp23.450.800,00	1 Kegiatan 99,79% Rp 23.400.500,00			
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan 100% Rp17.262.900,00	1 Kegiatan 99,99% Rp17.262.000,00			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100% 100,00% Rp2.607.900,00	99,97% 99,97% Rp2.607.000,00			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100% 100,00% Rp2.607.900,00	99,97% 99,97% Rp2.607.000,00			
				1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Desa 100% Rp2.607.900,00	7 Desa 99,97% Rp2.607.000,00			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100% 100,00% Rp31.476.600,00	99,99% 99,99% Rp31.476.600,00			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100% 100,00% Rp31.476.600,00	100% 99,99% Rp31.476.600,00			
				1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan 100% Rp24.664.400,00	2 Kegiatan 99,99% Rp24.662.000,00			
				2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7 Desa 100% Rp6.812.200,00	7 Desa 99,98% Rp6.811.000,00			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100% 100,00% Rp9.700.800,00	99,98% 99,98% Rp9.699.000,00			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100,00%	99,98% 99,98%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp 9.700.800,00	Rp 9.699.000,00			
				1. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Desa	7 Desa			
					100%	99,97%			
				2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp2.607.900,00	Rp2.607.000,00			
					1 Laporan	1 Laporan			
					100%	99,99%			
					Rp7.092.900,00	Rp7.092.000,00			

2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
1	Jumlah kegiatan Pelayanan Masyarakat yang dikordinasikan/ difasilitasi	%	90%	100%	111.11%	
2	Jumlah kegiatan peraturan dan perundangan yang dikordinasikan/difasilitasi	buah	15		0%	
3	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintah	desa	7	7	100%	
4	Jumlah akta jual beli tanah yang diterbitkan dan jumlah sengketa tanah yang difasilitasi penyelesaiannya	surat	30		0%	belum PPTAS
5	Jumlah satuan informasi kependudukan yang dihasilkan	buah	5	5	120.00%	dikoordinasikan ke 7 desa
6	Jumlah unit pembangunan sarana/prasrana pekerjaan umum yang diawasi dan dikordinasikan	%	100%	100%	100%	
7	Jumlah IMB yang diterbitkan	buah	50		0%	bukan kewenangan
8	Jumlah kegiatan pertanian dan perikanan yang diasilitasi	kegiatan	45		0%	pemerintah desa koordinasi langsung ke dinas terkait
9	Jumlah pelaku usaha UKM yang diberi rekomendasi	pengusaha	45		0%	pemerintah desa koordinasi langsung ke dinas terkait
10	Jumlah rekomendasi bidang pendidikan yang dihasilkan	buah	9		0%	ditangani langsung oleh instansi terkait
11	Jumlah kejadian penyakit dan gizi buruk yang dilaporkan	orang	5	0	0%	tidak ada kejadian
12	Jumlah PMKS yang direkomendasikan mendapat penanganan	kk	30		0%	tidak ada kejadian
13	Jumlah data ketenagakerjaan yang dihasilkan	data	1		0%	pemerintah desa koordinasi

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
						langsung ke dinas terkait
14	Jumlah nilai-nilai budaya lokal, sejarah lokal, lembaga adat, lembaga keagamaan yang difasilitasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.	kegiatan	15	0	0%	
15	Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang difasilitasi	klub	10	6	60%	1 klub olah raga tiap desa
16	Cakupan koordinasi penanganan konflik sosial dan peningkatan kesadaran kesatuan bangsa dan politik	%	100%	100%	100%	
17	Cakupan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keamanan (K3) yang dikordinasikan/difasilitasi penanganannya.	%	100%	100%	100%	

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilombakan	kegiatan	2	1	50.00%	
2	Jumlah Budaya / Nilai Sejarah Yang Dibina Dan Dikembangkan	kegiatan	4	0	0.00%	
3	Jumlah Kegiatan Pemuda Dan Olah Raga Yang Dibina	klub	3	6	200.00%	
4	Jumlah Desa Sehat Yang Dibina	desa	2	1	50.00%	
5	Jumlah Pelaku Usaha UMKM Yang Direkomendasikan	umkm	2	2	100.00%	
6	Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	85%	73.97%	87.02%	
7	Jumlah Desa Dengan Realisasi PBB Yang Mencapai Target	desa	7	7	100.00%	
8	Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	95%	100%	105.26%	
9	Presentase Pelayanan Adminstrasi Pertanahan	%	100%	0	0.00%	
10	Penataan Administrasi Asset / Kekayaan Daerah	%	90%	100%	111.11%	
11	Jumlah Informasi Potensi Bencana Alam Yang Sampaikean Ke Masyarakat	kegiatan	1	1	100.00%	
12	Jumlah SDLH, Illegal Logging Dan Illegal Fishing Yang	kegiatan	6	6	0.00%	

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
	Diawasi					
13	Presentasi Pelaksanaan Dan Penerapan Perda	jumlah				
14	Presentasi Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	%	100%	100%	100.00%	
15	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi APBDes	desa	7	7	100.00%	
16	Jumlah Desa Siaga	desa	7	7	100.00%	
17	Jumlah desa yang diikuti dalam lomba desa	desa	2	0	0.00%	
18	Presentasi penurunan jumlah penderita gizi buruk	%	85%	90%	105.88%	
19	Presentase penurunan jumlah temuan pada laporan keuangan desa	%	10%	10%	100.00%	

2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Kecamatan Pasimasunggu	Rp1.911.907.500	Rp1.561.606.939	Rp 350.300.561	81,68	9	98,52	19	81,68

2.1.5 Inovasi

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1				

2.1.6 Prestasi/Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8

2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/	Tentang		
		Tanggal Pengesahan			
1	2	3	4	5	6

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

-----NIHIL-----

3.2 Hambatan – Hambatan

Permasalahan

Pada Tahun ini Pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hampir seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana beberapa tahun sebelumnya. Nyaris pada saat bersamaan kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Masyarakat tidak lagi mampu secara normal untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian halnya di pelayanan kantor kecamatan Pasimasunggu. Seluruh kegiatan administrasi cenderung mengalami penurunan pelayanan masyarakat. Hal ini diakibatkan adanya kekhawatiran masyarakat akan infeksi covid-19 yang belum tuntas ditangani.

Kondisi keuangan pemerintahan juga mengalami keterpurukan. Adanya efisiensi anggaran dan seterusnya

Hal lain yang merupakan permasalahan yang terjadi di kecamatan Pasimasunggu adalah adanya bencana alam berupa cuaca buruk, gempa dan intensitas curah hujan yang tinggi. Hal ini berdampak pada rusaknya beberapa sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan dan beberapa rumah penduduk yang terdampak. Cuaca buruk juga menghentikan kegiatan bongkar muat barang di

dermaga Pasimasunggu. Lalu lintas penyebrangan juga memberikan dampak buruk terhadap perjalanan warga.

Secara umum permasalahan yang dihadapi di kecamatan pasimasunggu adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
3. Anggaran pelaksanaan kegiatan yang minim;
4. Dukungan dari OPD terkait dinilai masih lamban;
5. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Solusi

Kecamatan Pasimasunggu mencoba untuk memahami kondisi perekonomian masyarakat. Ini dilakukan untuk memberikan dukungan moril maupun materil serta usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian pada kondisi sekarang ini.

Penanganan bencana alam berupa cuaca buruk, gempa dan intensitas curah hujan yang tinggi dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait terkait keadaan bencana dan pencegahan pohon-pohon yang dapat tumbang di pinggir jalan yang dapat mencelakai warga yang sedang melintas. Pada penanganan terhambatnya lalu lintas laut akibat cuaca buruk dilakukan dengan memastikan ketersediaan bahan pangan telah diidentifikasi dapat bertahan hingga peringatan cuaca buruk berakhir. Demikian halnya dengan penanganan pasca gempa dilakukan dengan mengidentifikasi daerah daerah yang terdampak gempa dan memberikan bantuan bersama dengan pihak terkait.

Dukungan APBD 2025 yang ada dimanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna demi mencapai target organisasi yang diharapkan. Aktifitas pemerintahan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pembangunan daerah. Melalui pendekatan kebutuhan diharapkan APBD pada tahun berikutnya lebih dapat mengakomodasi keperluan kewilayahan.

Secara umum solusi yang dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan dukungan Sumber Daya Manusia;
2. Mengefektifkan fasilitas yang tersedia disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait disesuaikan dengan program kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasimasunggu;
4. Mengusulkan penganggaran yang lebih maksimal guna memenuhi kekurangan yang ada di Kantor Kecamatan Pasimasunggu;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya peran wanita dan berusaha menjaga hubungan dengan Tokoh Masyarakat , Agama, Pemuda dan Wanita yang ada di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu.

BAB IV PENUTUP

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pasimasunggu selama tahun 2024, telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2025, diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang dalam melakukan perbaikan ke depan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2024 bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2025 ini, sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara jujur dan sangat disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan belum semua permasalahan dapat diatasi serta memuaskan semua pihak, namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Kecamatan Pasimasunggu. Penyelenggaraan pemerintahan adalah komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh

aparatur pemerintah daerah untuk menyatukan langkah dan membulatkan tekad serta bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kecamatan Pasimasungu kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar serta khususnya kepada Masyarakat di Kecamatan Pasimasungu yang terhormat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimasungu Tahun 2025 Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita untuk memperoleh manfaat dari proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Visi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu "Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural". Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Benteng Jamea, 24 Februari 2026

KECAMATAN PASIMASUNGGU,

MUR AMIN, S.Sos.I

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 198409032011011014